ETIKA POLITIK DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH (1997-2003)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA FILSAFAT ISLAM

OLEH :

JEMI CARTER ROPI
NIM. 98512752

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Yogyakarta, 7 April 2005

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Jemi Carter Ropi
NIM	:	98512752
Jurusan	:	Aqidah Filsafat
Judul Skripsi	:	Etika Politik Dalam Persfektif Muhammadiyah (1997-2003)

Maka selaku Pembimbaing/Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing,

Drs. H. M. Fahmi, M.Hum
NIP: 150 088748

Pembantu Pembimbing,

Drs.Zuhri, M.Ag
NIP: 150 318017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS USHULDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN
Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1168/2005

Skripsi dengan judul: *Etika Politik dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003)*

Diajukan oleh :
1. Nama : Jemi Carter Ropi
2. NIM : 98512752
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Senin, tanggal: 2 Mei 2005 dengan nilai: 78,33 (B) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Muzairi, M.A
NIP. 150215586

Sekretaris Sidang

Ustadzi Hamzah, M.Ag
NIP. 150298987

Pembimbing/merangkap Penguji

Drs. H. M. Fahmie, M.Hum.
NIP. 150088748

Pembantu Pembimbing

H. Zuhri, M.Ag
NIP. 150318017

Penguji I

Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 150 239744

Penguji II

Fahruddin Faiz, M.Ag
NIP. 150298986

Yogyakarta, 02 Mei 2005
DEKAN

Drs. H.M. Fahmie, M Hum
NIP. 150088748

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Awal reformasi bangsa Indonesia tahun 1997 merupakan titik awal dari pergerakan rakyat Indonesia untuk menuju pada cita-cita negara dalam segala bidang terutama dalam sosio politik bangsa. karena dengan adanya reformasi politik, Indonesia menjadi terbuka dan menemukan suasana baru yang lebih maju. Namun, dengan situasi politik maupun prilaku politik yang yang lebih terbuka akan muncul oknum yang menggunakan cara mengesampingkan etika politik serta menyalahgunakan kekuasaan dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena etika politik mempertanyakan claim-claim sekitar politik, maka dari itu etika poltik mempertanyakan tanggung jawab manusia dalam dunia politik dan mampu memberikan kritik, solusi, terhadap perjalanan politik bangsa

Maka oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengetahui bagaimana Etika Politik Dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003) ketika berhadapan dengan munculnya reformasi pada tahun 1997 sampai pada tahun 2003 yang menuntut berbagai perubahan di Indonesia terutama perubahan dalam dunia politik.

Maka, penelitian terhadap Etika Politik Dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003) menggunakan pendekatan filosofis yaitu apakah Muhammadiyah Sebagai oraganisasi sosial kemasyarakatan yang beramar ma'ruf nahi munkar dalam etika politiknya sudah sesuai dengan keinginan bangsa dan dapat memberi pengaruh untuk mendapatkan sistem politik yang baik dan bijak dan mampu memberi kritik bagi realita politik bangsa terutama pada tahun 1997-2003.

Dalam hal ini, data dikumpulkan memaparkan Etika Politik Dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003) serta permasalahan yang berkaitan di dalamnya, serta baragam kritik dan sarannya terhadap perubahan yang terjadi seraya menelaah rentetan sejarah hubungan Politik dan Muhammadiyah kemudian penelti mengambarkan dengan menganalisis bagaimana perkembangan hubungan politik Muhammadiyah dalam kurun waktu 1997-2003.

Berkaitan dengan ini, menyebab perlu adanya secara aktual Etika Politik Dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003) apakah benar-benar sudah sesuai dengan gerakan dakwahnya amar maruf nahi munkar untuk mewujudkan masyarakat yang utama, adil dan makmur.

Dengan memperhatikan masalah yang telah diuraikan diatas, menurut penyusun dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian terhadap Etika Politik Dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003) agar mampu memberi solusi dan kritik terhadap gerak langkah politik agar tetap bertanggungjawab supaya terciptanya keadilan yang adil dan makmur.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسو له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا .

أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, salawat serta salam kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Etika Politik Dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003)".

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama yang terhormat kepada:

1. Bapak Drs. H.M. Fahmi, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H.M. Fahmi, M.Hum, dan Drs, Zuhri, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi di berbagai tempat sehingga sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ayahanda Mukhtar Ropi dan Ibundaku tercinta Hj. Nuraya beserta kakak-kakakku tercinta H. Yuhadi Ropi dan Mashuri Ropi, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta do`a dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabatku Alumni Mu`alimin dan Mu`allimat'98 yang tidak henti hentinya memberikan motifasi pada penyusun untuk merampungkan skripsi ini.
5. dan mereka semua yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya dalam memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa baik materil maupun Sprituil, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan hingga terselesaikanya tugas akhir akademik ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, penyusun berlapang dada menerima saran dan kritik serta ide yang bersifat membangun demi terciptanya sebuah penelitian yang lebih baik dimasa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon ampunan dan berserah diri.

Yogyakarta, 27 safar 1424 H
7 April 2005 M

Penyusun

Jemi Carter Ropi
NIM: 9851 2752

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

NOTA DINAS..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

D. Tinjauan Pustaka..... 6

E. Metodologi Penelitian..... 10

F. Sistematika Pembahasan..... 11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUHAMMADIYAH

A. Arti Muhammadiyah..... 13

B. Faktor-faktor Pendorong Berdirinya Muhammadiyah..... 14

1. Faktor Subyektif..... 14

2. Faktor Obyektif..... 17

C. Muhammadiyah dan Perpolitikan Indonesia..... 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Sistem Orde Lama..... 20

2. Sistem Orde Baru..... 26

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA POLITIK

A. Dimensi Politik Manusia..... 30

B. Memahami Nalar Politik..... 31

C. Etika dan Politik..... 33

E Etika Politik..... 37

F Tujuan Etika Politik..... 40

BAB IV ETIKA POLITIK MUHAMMADIYAH 1997-2003

A. Demokrasi..... 42

B. Politik..... 49

C. Partai Politik..... 55

D. Pemilu..... 63

BAB V PENUTUP

Kesimpulan..... 74

Saran-saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Kurikulum Vitae.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika politik mempertanyakan tanggung jawab manusia sebagai manusia sebagai warga negara dan terhadap hukum yang berlaku. Sebagai ilmu dan cabang filsafat pertama kali lahir di Yunani sebagai respon terhadap struktur-struktur politik tradisional yang mulai ambruk. Dari keambrukan itu, kemudian muncul berbagai macam "kegelisahan" dan pertanyaan seperti: bagaimana seharusnya masyarakat ditata? Siapa yang harus menata? Atas dasar apa penataan masyarakat itu? Dua ribu tahun kemudian, kurang lebih lima ratus tahun yang lalu, etika politik bertambah momentumnya ketika legitimasi kekuasaan raja dalam tatanan hirarkis kosmos tidak lagi diterima begitu saja; legitimasi-legitimasi tatanan hukum dan negara, dan hak raja untuk memerintah masyarakat dipertanyakan. Itulah situasi kebangkitan filsafat politik pada umumnya dan etika politik pada khususnya pada awal zaman industrialisasi. Adanya klaim-klaim legitimasi kekuasaan yang saling bertentangan selanjutnya menuntut refleksi filosofis atas prinsip-prinsip dasar kehidupan politik yang ada.[1]

Etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata dan memerintah masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar; etika politik mengandalikan prinsip-prinsip etika dasar dengan beberapa implikasi langsung pada kedudukan manusia. Prinsip dasar yang diandaikan ialah bahwa

---

[1] Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 3.

manusia—apriori dan *Prima Facie*—harus bersikap baik dan tidak buruk terhadap siapa dan apa saja yang ada, jadi bahwa terhadap apa saja yang ada kita apriori mengambil sikap yang mendukung, membela, menyetujui, memajukan, melindungi, memberi ruang perkembangan daripada merusak, menyiksa, mengerem, mencekik, membatasi, mematikan. Prinsip itu terwujud dalam prinsip kesejahteraan umum—yang mempunyai relevansi politik tinggi—yang berisi bahwa semua tindakan dan kebijaksanaan, harus demi keuntungan yang sebesar-besarnya dari orang sebanyak-banyaknya, asal saja tidak melanggar hak dan keadilan.

Prinsip dasar lain adalah prinsip keadilan yang mengatakan bahwa kita wajib untuk memperlakukan semua orang dengan adil, artinya untuk menghormati hak-hak mereka dan memberikan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama. Prinsip keadilan itu sendiri bersandarkan pada prinsip hormat terhadap person yang mengungkapkan kewajiban untuk memperlakukan segenap manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah sebagai sarana untuk tujuan-tujuan lebih jauh betapapun besar manfaatnya. Prinsip itu menuntut juga tanggungjawab manusia terhadap dirinya sendiri: bahkan, demi tujuan yang baik ia jangan pernah memberikan diri dipakai sebagai alat saja, diperas, diperkosa, atau diperbudak.[2]

Prinsip-prinsip itu mempunyai implikasi-implikasi yang sangat relevan untuk etika politik, misalnya bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam martabat mereka sebagai manusia, jadi bahwa mereka sebagai manusia harus berkedudukan sama dalam masyarakat, dengan hak-hak dasar yang sama.

---

[2] *Ibid.*, hlm. 27

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Manusia berhak atas kebebasannya dan manusia hanya boleh dibatasi demi kebebasan yang sama dari setiap anggota masyarakat dan demi kepentingan bersama. Persaudaraan antar semua orang, kelompok, golongan dan bangsa merupakan suatu keharusan yang wajib diusahakan dengan sekuat tenaga. Dalam hal ini terimplikasi juga kewajiban mengusahakan perdamaian dan mencegah perang dan konflik.[3] Hormat terhadap manusia dengan sendirinya mengimplikasikan hormat terhadap keutuhan hakikinya. Keyakinan-keyakinan moral inilah yang mendasari etika politik.

Meskipun etika politik berlandaskan kepada pengandaian dasar-dasar moral, tetapi etika politik tetap bertolak dari realitas kongkrit politik suatu bangsa—seperti pada awal kelahirannya di Yunani. Dengan demikian, cukup beralasan jika realitas politik Indonesia juga telah mengilhami atau melatarbelakangi lahirnya konsep-konsep etika politik.[4] Dalam perpolitikan Indonesia, harapan serta keinginan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, telah lama dirindukan dan dinantikan kedatangannya. Tetapi yang terjadi justru kenyataan sebaliknya. Korupsi, kolusi dan nepotisme—yang berarti pelanggaran terhadap nilai dasar moral—telah menjadi rahasia umum, sehingga hanya keprihatinan yang mendalam jika kita mengamati perkembangan politik tersebut. Keprihatinan itu akan semakin dalam bila dikaitkan dengan posisi

---

[3] *Ibid.*, hlm 27-28.

[4] Seperti halnya kelahiran konsep etika politik di Barat, pemikir-pemikir di Prancis, Inggris, Jerman, juga selalu melahirkan konsepnya karena diilhami dan dilatarbelakangi keadaan sosial politik yang melingkunginya kemudian melahirkan konsep-konsep politik secara umum maupun etika politik secara khusus seperti yang saat ini kita kenal dalam literatur-literatur filsafat dan politik. Demikian di Indonesia, realitas politik yang "amburadul" akan mengilhami lahirnya konsep-konsep pemikiran etika politik, baik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi maupun perseorangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar di muka bumi,[5] tetapi justru rapuh dalam masalah etika dan moral. Pertanyaan yang akan segera timbul adalah mengapa bangsa ini sangat rentan dan rapuh dalam masalah moral dan etika? Lebih khusus lagi mengapa bangsa Muslim terbesar di muka bumi ini tidak dapat dijadikan teladan dalam hal moral dan etika, termasuk moral dan etika politik?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong berbagai kalangan untuk merefleksikan secara filosofis pemikirannya tentang landasan dasar etika dan moral yang bagaimana yang kiranya dapat menjadi dasar sekaligus solusi bagi terciptanya perpolitikan yang sehat, jujur, adil dan demokratis di Indonesia. Dari sinilah penting untuk melihat konsepsi pemikiran etika politik Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang juga memiliki keprihatinan yang mendalam atas realitas perpolitikan di Indonesia khususnya sejak masa reformasi sampai saat ini yang lebih banyak mengedepankan syahwat berkuasa sehingga melumpuhkan hati nurani manusia dan etika politik menjadi berantakan.[6] Meluasnya dan menjamurnya kekerasan, penjarahan atau pembunuhan yang sudah tidak mungkin untuk semata dimengerti dan dimanipulasi sebagai masalah kriminal dan kejahatan biasa. Kekerasan yang berkembang itu telah tumbuh dalam kecepatan tinggi dan menyebar kemana-mana diberbagai kepulauan Nusantara.

---

[5] Jumlah total penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2000 adalah 205. 843. 196 dengan pernadingan komposisi penganut agama sebagai berikut: Muslim berjumlah 177. 528. 772 (88, 22 %) Protestan/Katolik 17. 954. 977 (8, 92 %), Hindu 3. 651. 939 (1, 81 %), Budha 1. 694. 682 (0, 84 %), Konghucu (data 1971) 972. 133 (0, 82 %), lain-lain 411. 629 (0, 20 %). Angka-angka ini menunjukan secara nominal kuantitatif bahwa bangsa Indonesia di samping bangsa Muslim terbesar juga sebagai bangsa religius. Lihat Leo Suryadinata, Levi Nurfidya, Aris Ananta, *Indonesian Population: Ethnicity and Religion in Changing Political Landscape* (Singpore: Institute of Southeast Asian Studes, 2003), hlm. 1004.

[6] Lihat Ahmad Syafi'I Maarif "Etika Politik dalam Msyarakat Kontemporer Indonesia", Makalah seminar Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-26 di Padang 1-5 Oktober 2003. hlm. 4.

Maka masalah ini sepenuhnya menjadi masalah politik, namun juga sebagai tantangan bagi etika politik yang dihadapi Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan sosial yang beramar ma'ruf nahi munkar.[7]

Konsepsi pemikiran etika politik Muhammadiyah penting untuk dikaji setidaknya didasarkan pada tiga alasan: *pertama* Muhammadiyah memandang bahwa sesungguhnya ada hubungan yang organis antara dakwah dan politik. Dalam banyak hal, dalam pandangan Muhammadiyah, kelancaran dakwah dan syiar Islam ditentukan oleh payung politik yang ada. Bila payung politik tidak melindungi kelancaran dakwah, maka organisasi seperti Muhammadiyah akan merasa "kepanasan" atau "kedinginan." Jadi, politik juga salah satu medan untuk berdakwah.[8] *Kedua,* Muhammadiyah merupakan organisasi sekaligus juga gerakan intelektual yang dikenal dengan ide pembaharuannya, dan memiliki berbagai lembaga pendidikan tinggi yang dapat dijadikan sebagai wadah "kaderisasi" para ilmuwan dan calon politisi yang berpengaruh di negeri ini yang sepuluh atau dua puluh tahun kemudian akan menjadi pengambil kebijakan strategis.[9] *Ketiga,* Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam gerakan reformasi—termasuk dalam meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru di bawah penguasa Soeharto pada tahun 1998.[10]

---

[7] Emmanuel Subangun, *Politik Anti Kekerasan pasca Pemiulu 99* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm,.82

[8] Lihat Amin Rais, *Moralitas Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Dinamika 1995), hlm. 44.

[9] Lihat Abdul Munir Mulkhan, *Menggugat Muhammadiyah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2000), hlm. 161-162

[10] Salah satu bukti bahwa Muhammadiyah punya andil besar dalam "meruntuhkan" rezim Orde Baru adalah dalam sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya 11-13 Desember 1993 sudah membicarakan masalah suksesi kepemimipinan. Ini artinya bahwa di mata Muhammadiyah secara

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan satu rumusan masalah yakni *bagaimana etika politik dalam perspektif Muhammadiyah?* Khususnya sejak tahun 1997-2003 (masa reformasi)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahuai bagaimana etika politik dalam presfektif Muhammadiyah,
2. Untuk memahami dan mengetahui kelemahan dan kelebihan pandangan etika politik Muhammadiyah,

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana Filsafat Islam dari jurusan Aqidah filsafat pada Fakultas Ushuludin UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta dan memperkaya literatur kefilsafatan pada Fakultas Ushuluddin khususnya yang berkaitan dengan etika politik dalam presfektif Muhammadiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan dan penelitian mengenai etika politik saat ini cukup banyak yang sudah terpublikasikan dalam karya ilmiah, baik berupa paper, makalah, maupun buku. Namun penulis sampai sekarang belum menemukan karya dalam bentuk penelitian yang membahas tentang etika politik menurut Muhammadiyah secara spesifik khususnya dalam periode waktu 1997-2003.

---

etis kepemimipinan Soeharto dengan orde barunya sudah tidak layak lagi menguasai bangsa Indonesia. Lebih jelasnya lihat *Ibid.*, 47-60.

Penulis` telah membaca dan melakukan penelusuran beberapa karya yang berkaitan dengan etika politik secara umum. Etika politik selalu terkait dengan kekuasan politik. Kekuasaan adalah kekuatan untuk mengatur masyarakat dalam suatu negara yang mempunyai konstitusi sebagai dasar hukum untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan tujuan negara. Kekuasaan dan politik sering bermain dalam dataran klaim atau pengakuan atas nama pembangunan, atas nama ummat Islam, atas nama konstitusi, atas nama negara dan sebangsanya.[11] Untuk mengatur negara, tentunya dibutuhkan etika politik yang "mapan" dalam mengatur masyarakat bernegara.

Dalam sikripsi Moh Ainu Najib, *Etika Politik, (Telaah Kepatuhan Sokrates terhadap Konstitusi*) dipaparkan bahwa etika politik secara garis besar membahas tentang hukum dan kekuasaan negara. Hukum tanpa negara hanya bersifat normatif karena tidak mempunyai landasan berpijak tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak secara subyektif, sedangkan negara tanpa hukum akan buta dan akan merosot ke tingkat manusiawi karena tidak lagi berdasarkan tatanan normatif. Negara yang memakai kekuasaan di luar hukum, sama dengan manusia berbuat sesuatu tanpa pengertian.[12]

Kemajemukan moral dari suatu masyarakat dengan sendirinya menjadi persoalan bagi moral dan filosuf etika yang ingin mendapatkan seperangkat standart (patokan) yang universal yang menjadi semua dasar semua masyarakat,[13]

---

[11] Haidar Nashir, *Pragmatisme Politik kaum Elite* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 46-47.

[12] Moh Ainun Najib, *Etika Politik Telaah Kepatuhan Socrates Terhadap Konstitusi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm,.65.

[13] Robert C. Salomon, *Etika Suatu Pengantar*, terj. R. Andre Karo-Karo, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 10.

disamping itu etika politik menuntut kepada pemegang kekuasaan agar pemerintahan dijalankan dengan hukum yang berlaku (*legalita*) disahkan secara demokratis (*legitimte*) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral.[14]

Hedar Nashir dalam bukunya *Dinamika Politik*, menunjukan bahwa berbicara tentang hubungan politik, yang dipahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan politik itu? Minimal makna politik itu ada tiga: 1) pengetahuan mengenai negara. 2) segala urusan tentang urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, negara atau negara lain. 3) cara bertindak dalam menghadapi masalah.[15] Hal ini telah dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial.

Mitsuo Nakamura dalam karyanya "*Dua Kontribusi Muhammadiyah*" menjelaskan bahwa ada dua kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupun politik. Dalam kaitan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, *pertama*, Muhammadiyah ikut mengembangkan eksistensi negara Indonesia sebagai kesatuan politik. *Kedua*, Muhammadiyah menjadi mampu mengembangkan inisiatif masyarakat secara baik.[16] Dalam tesis Itok Wicaksono yang berjudul *Politik Muhammadiyah Pasca Muktamar Ujung Pandang pada Tahun 1971*, menjelaskan tentang aktivitas politik Muhammadiyah sejak muktamar Muhammadiyah di Ujung Pandang lebih bersifat netral terhadap kegiatan politik

---

[14] Franz Magnis. *Op cit.*, hlm. 5.

[15] Haedar Nashir. *Dinamika Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 1996), hlm.26.

[16] Mitso Nakamura, *Dua Kontribusi Muhammadiyah dalam Dain al Islam Dan kemuhammadiyahan* (Malang: Pusat Dokumentsi dan Pulikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 1990), hal. 114.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

praktsis.[17] Namun Muhammadiyah mempunyai perhatian terhadap politik sesuai dengan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*nya. Dalam sikripsi Marjianto, *Muhammadiyah Dalam Kehidupan Politik Indonesia (Era Kepemimpinan Amien Rais)*, menjelaskan bahwa kritik, saran dan himbauan kepada pemerintah yang merupakan manisfestasi/wujud nyata *High Politics* harus senantiasa dilakukan Muhammadiyah sampai usahanya berhasil. Walaupun Muhammadiyah Sebagai Gerakan Sosial dan Dakwah, Muhammadiyah tetap berperan dalam proses politik dalam setiap rezim yang berkuasa.[18]

Selain buku-buku yang tersebut di atas, Muhammadiyah dan kaitannya dengan politik Indonesia juga tertulis dalam jurnal Tanwir ya, *Matahari Bersinar di Atas Negara* memqpqrkqn tentang Perjalanan Politik Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan hingga ahmad Syafii Ma'arif.[19] Tidak ketinggalan juga dalam *Berita Resmi Muhammadiyah 04/2003* yang berisi tentang keputusan-keputusan Tanwir Muhammadiyah tahun 2004 di Makassar yang salah satu isinya mengenai politik.[20]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Itok Wicaksono, *Politik Muhammadiyah Pasca Muktamar Ujung Pandang*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 89.

[18] Muhammad Hasanuddin, *Muhammadiyah: Politik Dan Amal Usahanya Pada Masa Orde Baru*, (Yogyakarta: Sejarah Kebudayaan Islam FakultasAdab IAIN Sunan Kalijaga, 1995),.hlm.34.

[19] Abd. Rochim Ghazali, "Matahari Bersinar di Atas Negara: Perjalanan Politik Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan hingga Ahmad Syafii Ma'arif", dalam *Tanwir*, edisi perdana, vol. I, Mei, 2003, hlm. 7-11.

[20] *Berita Resmi Muhammadiyah No. 04/2003 Rajab 1424 H/September 2003* (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, 2003), hlm. 20-21.

E. Metodologi Penelitian

Untuk membuat hasil penelitian yang baik dan komprehensif diperlukan metodologi[21] penelitian yang baik dan standar sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah.

Sebagai langkah awal penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang berkaitan dengan masalah yang menjadi persoalan dalam penelitian ini (Etika Politik dalam Perspektif Muhammadiyah) dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, ensiklopedi dan situs-situs internet. Setelah data-data diperoleh, maka akan dilakukan langkah-langkah metode sebagai berikut:

2. Verifikasi

   Dari data-data yang diperoleh, tentu tidak semua data sesuai dengan yang dimaksudkan oleh peneliti, sehingga akan dilakukan pemilahan dan penyeleksian data-data yang ada. Setelah itu kemudian dikaji dan ditelaah.

3. Deskripsi

   Dari data yang telah terseleksi dan ditelaah maka selanjutnya akan dideskripsikan tentang etika politik dalam perspektif Muhammadiyah. sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang konsep etika politik Muhammadiyah.

4. Holistika

[21] Metode"berasal dari Yunani "methodos" sambungan kata depan "meta" yaitu menuju, melalui atau mengikuti, dan kata "hodos" yaitu jalan, perjalanan, cara atau arah. Kata "methodos" kemudian arti sebagai bertindak menurut aturan sistem aturan tertentu. Muksudnya ialah supaya kegiatan praktis dapat terlaksana secara rasional dan terarah agar dapat mencapai hasil yang maksimal, dalam Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indo, 1984), hlm.10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Langkah selanjutnya, untuk melihat kepaduan konsep etika politik Muhammadiyah maka perlu dilihat latar belakang Muhammadiyah memunculkan pandangan etika politiknya.

5. Analisis

Setelah terdeskripsi secara holistik etika politik Muhammadiyah, maka akan dianalisis guna mendapatkan konsep yang valid dan "meyakinkan."

F. Sistematika Pembahasan

Naskah sikripsi ini direncanakan akan terwujud dalam lima bab bahasan, yang mana satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan secara runtut, sistimatis dan logis.

Bab I yaitu Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistimatika pembahasan.

Bab II membahas seputar pengertian Muhammadiyah: faktor pendorong berdirinya Muhammadiyah yang terdiri dari faktor subyektif dan faktor obyektif, maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta Muhammadiyah Dan Perpolitikan Indonesia: Yang terdiri dari Orde Lama dan Orde Baru.

Bab III membahas tentang pengantar teoritik tentang etika politik: yang meliputi dimensi politik manusia, memahami nalar politik manusia, etika dan politik, etika politik, tujuan etika politik.

Bab IV menjelaskan tentang etika politik Muhammadiyah yang mencakup, Demokrasi, politik, partai politik dan pemilu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab V merupakan Penutup yang berupa kesimpulan dari keseluruhan kajian skripsi ini dan saran-saran dari peneliti bagi para peminat kajian yang sama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Etika Politik dalam Persfektif Muhammadiyah 1997-2003 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang bergerak dibidang sosial-kemasyarakatan lahir 8 Zulhijjah (18 November 1912 M) di Yogyakarta. Dalam menghadapi baik, politik, partai politik, demokrasi,pemilu di Indonesia khususnya tahun 1997-2003, hubungan Muhammadiyah lebih cenderung melalui *high Poltics,* politik yang mengedepankan nilai-nilai luhur etika dalam berpolitik sehingga tetap memainkan perannya dengan menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar dalam mempengaruhi proses-proses kebijakan negara agar tetap sejalan dengan cita-cita luhur bangsa.

Saran-saran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menyikapi fenomena politik yang berlangsung dari 1997 sampai 2003 dan etika politik Muhammadiyah ada beberapa catatan sekaligus saran yang dapat diberikan penyusun setelah melakukan pengkajian terhadap pokok permasalahan penelitian.

1. Hendaknya Muhammadiyah tetap berada dalam posisi netralitas terhadap politik dan menjalan *high politik* dan tidak masuk dalam kegiatan politik praktis. sehingga tidak berdampak merugikan Muhammadiyah sebagai

organisasi sosial kemasyarakatan yang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.

2. Berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dan high politics yang dilakukan Muhammadiyah terhadap sosio politik yang kita hadapi, dapat kita jadikan bahan refleksi dalam menghadapi permaslahan politik saat ini yang semakin komleks dan rumit.
3. Hendaknya kita memiliki pemahaman terhadap etika politik sehingga kita tidak terjebak ke dalam penguasaan yang hanya untuk kepentingan sesaat baik kepentingan individu maupun kelompok yang merugikan orang lain.
4. Hendaknya pemahaman tentang etika politik menjadi perhatian bagi mahasiswa Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin yang setidaknya sudah banyak mempelajari dan memahami realita politik yang telah terjadi.
5. Semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi semua orang amien.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku-Buku

Ahmad, Nur (Editor). *Muhammadiyah digugat*. Jakarta: Harian Kompas, 2001.

Alkindi, H Jasman. "Muhammadiyah Dalam dinamika Politik Bangsa" dalam Sugarmanto Haedar Nashir dan Rusli Karim. *Muahammadiyah Dan Tantangan Masa Depan*" Sebuah Dialog Intelektual". Yogyakarta:Tiara Wacana, 1990.

Amura, H. "Muhammadiyah Masa Lalu Sekarang Dana Masa Akan Datang" dalam Rusli Karim (ed), *Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentar*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Armando, Ade (dkk,). *Suara Mahasiswa Universitas Indonesia Menyelamatkan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Auri dalam wawancara dengan Amien Rais tanggal 22 Juli 1998 dalam Suwarno *Muhammadiyah sebagai oposisi*. Yogyakarta: UUI Press. 2001.

Bagus, Lorens. *Kamus Fisafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indo,1984.

Benda, Harry, J. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit, Islam Indonesia Pada Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya , 1980.

Berita resmi Muhammadiyah, " Tanfidz Keputusan Tanwir Muhamınadiyah 2002di Bali" BRM. No. 02/2002 Dzulhijjah 1422 H/Maret 2002 M.

Berita Resmi Muhammadiyah. No, 04/2003 Rajab 1424 H/September. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003.

Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia* pent. Safroedin Bahar. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.

Budiardjo, Mariam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1981.

Departemen Penerangan RI. *Siapa Yang Tidak Tahu Muhammadiyah*, Jakarta: 1986.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan. *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

C, Jack Plano; Robert E. Riggs; Helenan S. Robin. *Kamus Analisa Politik*. Terjemahan, Jakarta: Rajawali, 1994.

Dokumen Tanwir 2002 di Bali, Yogyakarta: Bagian Dokumentasi Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2002.

Ghazali, Abdul Rochim. *Matahari Bersinar Di Atas Negara: Perjalanan Politik Muhammadiyah Dari Ahmad Dahlan Hingga Syafii Maarif.* dalam Tanwir Edisi Perdana Vol. 1.Mei 2003.

Giddens, Anthony. *Sociology.* second edition. Cambridge: Polity Press, 1993.

Hamka . *Muhammadijah Masyumi*. Jakarta: Masyarakat Islam

Hasanuddin, Muhammad. *Muhammadiyah Politik Dan Amal Usahanya Pada Masa Orde Baru.* Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Hefner, Robert W. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI dan TAF, 2001.

Jurdi, Syafruddin. Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi Tentang Tingkah Laku Elit Lokal Muhammdiyah Sesudah Runtuhnya orde Baru.Yogyakarta:UGM, 2002.

Kahin, George Mc Turman. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.* Jakarta: Sinar Harapan,1995.

Kartodjirjo, Artono, Marwati Djoened (dkk,). *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.

Kebung, Kodrat (dkk,). *Etika Politik Memerintah secara martabat*. Plores: STFK Ledalero,1986.

Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah Denpasar tahun 2002 dan Tanwir Makasar tahun, 2003.

"Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah" dalam *Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1999 di Bandung.*

Laporan P.P. Muhammadiyah kepda sidang tanwir tahun 1963 pada tanggal 7-10 November 1963 di Jakarta, "Almanak Muhammadiyah 1384 (1964/1965), XXIXV.

Lefs, M. C. Rik, *Sejarah Indonesia Modern*. Pent, Dharmon Johardjowidjono. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1988.

_____, "Muhammadiyah, Demokrasi dan Politik Mutakhir di Indonesia" disampaikan dalam *rapat kerja pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia* di Yogyakarta, 4-5 Rab'ul Akhir 1420/17-18 Juli 1999.

_____, "Etika Politik Masyarakat Kontemporer Indonesia" dalam *Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 Padang*. Majlis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003.

_____, "Muhammadiyah, PAN dan Amien Rais". dalam *http/www.m-amienrais.com/news/one_news.asp?IDNews=139*

_____, dalam Suwarno, pengantar buku *Muhammadiyah sebagai Oposisi.Yogyakarta*: UUI Press, 2001.

Madjid, Nurkholis. "Masalah Nasional Dan Agenda Pencerahan Bangsa" Dalam *dokumen tanwir Muhammadiyah di Denpasar*, 2003.

Masdar, litik Umarrudin (dkk,). *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: LkiS, 1999.

Mulkhan, Abdul Munir. *Menggugat Muhammadiyah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.

Najib, Moh' Ainun. *Etika Politik Telaah Kepatuhan Socrates Terhadap Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Nakamura, Mitsuo. *Dua kontribusi Muhammadiyah Dalam Dian Al Islam Dan Kemuhammadiyahan*. Malang: Pusat Dokumentasi Dan Publikasi Universitas Malang, 1990.

_____. *Bulan Sabit Muncul Dibalik Pohon Beringin*. Pent, Yusron Asrofie, Yogyakarta: Gajah Mada University Prss, 1983.

Nashir, Haedar. *Pragmatisme Politik Kaum Elite*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

_____, *Dinamika Politik Muhammadiyah*. yogyakarta: BIRAF Publishing, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Novianto, Kholid dan Al Chaidar. *Era Baru Indonesia Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Has, Mathori Abdul Djalil, Nur Mahmudi, Yusril Ihza Mahendra.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Pasha, Musthofa Kamal dan Ahmad Adabi Darban. *Muhammaduyah sebagai Gerakan Islam Dalam Perspektif Historis Dan Ideologis.* Yogyakarta: LPPI, 2000.

C, Jack Plano; Robert E. Riggs, Helenan S. Robin. *Kamus Analisa Politik.* Terjemahan, Jakarta: Rajawali, 1994.

PP Muhammadiyah Majelis pustaka. *Sejarah Muhammadiyah.* PW- Muhammadiyah lampung, 1996.

Rais, M. Amien. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta.* Bandung: Mizan, 1987.

_____. "High Ploitics"dalam kelompok studi lingkaran, *Intelektuailisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru.* Bandung: Mizan,1995.

_____. *Moralitas Politik Muhammadiyah.* Yogyakarta: Dinamika, 1995.

Sjoedja',H M. *Muhammadiyah Dan Pendirinya.* Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pustaka, 1989.

Soekarno. *Dibawah Bendera Revolusi.* Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965.

Solomon, Robert C. *Etika Suatu Pengantar.* Terj. R Andre Karo-Karo. Jakarta: Erlangga, 1987.

Subangun, Emmanuel. *Politik Anti Kekerasan Pasca Pemilu.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Suryadinata, Leo dkk. *Indonesian Population; Etnicity and Religion in Changing Political Lanscape.* Singapure: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral.* Yogyakarta: Kanisius, 1989.

_____. *Etika politik Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia, 2001.

_____. *Filsafat, Kebudyaan, Politik.* Jakarta: PT Gramedia, 1995.

Tamimi, M. Djindar. *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran Dan Amal Usaha.* Yogyakarata: PT Tiara Wacana Yogya dan Universitas Muhammadiyah Malang Press, 1990.

Warsito,Tulus. *Pembangunan Politik refleksi Kritis Atas Krisis.* Yogayakarta: Bigraf Publishing,1997.

Wicaksono, Itok. *Politik Muhammadiyah Pasca Muktamar Ujung Pandang.* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994.

Yusuf, Saifullah, Fahruddin Salim. *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi.* Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, 2000.

Zubair, Ahmad Charris dan Anton Bakker. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Kelompok Koran dan majalah

Denny J.A. "Sentimen Anti Pemilu dalam *Jawa Pos*. Kamis 8 Oktober 2003.

Isra, Saldi. "Baik-Buruk SI MPR Dipercepat" dalam *Republika*. 11 Juli 2001.

Jumpa pers Amien Rais dengan wartawan "Syafii Maarif Akan Pimpinan Parpol " dalam *Suara Muhammadiyah*, N0. 16 Th.83, 16-31 Agustus 1998.

K,Tri Arya Dyana,"Koreksi Hasil Pemilu" dalam *Jawa Pos*. senin 20 Agustus 2001.

Kuntowijoyo. "Partai Politik " dalam *Republika*. 16 Juni 1998.

Ketika Presiden dan MPR Saling Mengecam" dalam *Kedaulatan Rakyat*.11 Juli 2001

Mangunkusumo, Daliso. "Tolak Ukur Keberhasilan Demokrasi" dalam *Kedaulatan Rakyat*. 24 Juli 2001.

Nashir, Haedar. "Menjadi Kader Muhammadiyah" dalam *Suara Muhammadiyah* No.18 Th. Ke-82. tahun 1999.

_____. "Peran Politik Muhammadiyah" dalam *Suara Muhammadiyah*, No.8 Th. Ke-84 tahun 1999.

Rais, Amien. "Agenda Muhammadiyah Pasca Soeharto" dalam *Suara Muhammadiyah* No. 16 Th. Ke-83, 16-31 Agustus, 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Denny J.A. "Sentimen Anti Pemilu dalam *Jawa Pos*. Kamis 8 Oktober 2003.

Kuntowijoyo. "Partai Politik " dalam *Republika.* 16 Juni 1998.

_____, "Skenario Politik Pasca-Mega" dalam *Republika.* Sabtu 25 Januari 2001.

Isra, Saldi. "Baik-Buruk SI MPR Dipercepat" dalam *Republika*. 11 Juli 2001.

Yazid, TM.Lutfi, ''SI Dan Kepastian Masa Depan" dalam *Republika*.17 Juli 2001.
Wiranu, Chatibul Umam "Skenario Politik Pasca-Mega" dalam *Republika.* 25 Januari 2003.

Suara Muhammadiyah, no 5, 1964.

Suara Muhammadiyah tahun 1965.

Suara Muhammadiyah No. 19/81/1996, 1-5 Oktober 1996.

Suara Muhammadiyah No. 21 Tahun Ke-83. 1-15 November 1997.

Suara Muhammadiyah, No/09/Th.Ke-83, 12-15 Mei 1998.

Suara Muhammadiyah No. 14 Th Ke-83. 31 Juli 1998.

Suara Muhammadiyah NO. I Th Ke-82.

Nashir, Haedar. "Menjadi Kader Muhammadiyah" dalam *Suara Muhammadiyah* No.18 Th. Ke-82. tahun 1999.

_____. "Peran Politik Muhammadiyah" dalam *Suara Muhammadiyah*, No.8 Th. Ke-84 tahun 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Jemi Carter Ropi
Tempat Tgl Lahir	:	Kerinci, 12 Juni 1979
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat Asal	:	Desa Baru Lempur, Rt 1 No 1, Kec. Gunung Raya, Kab. Kerinci, Jambi
Alamat Di Jogja	:	Warungboto UH IV/952a Yoyakarta

Latar Belakang Keluarga

Nama Ayah	:	Mukhtar Ropi
Nama Ibu	:	Nuraya
Alamat	:	Desa Baru Lempur, Rt 1 No 1, Kec. Gunung Raya, Kab. Kerinci, Jambi
Jumlah Saudara	:	3
Anak Ke	:	3

Latar Belakang Pendidikan

1.	SD. Negeri Lempur Mudik	Selesai Tahun 1992
2.	MTs Mu'allimin Muhamadiyah Yogyakarta	Selesai Tahun 1995
3.	MA Mu'allimin Muhamadiyah Yogyakarta	Selesai Tahun 1998
4.	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Masuk Tahun 1998

Yogyakarta, 19 Februari 2005

Hormat kami,

Jemi Carter Ropi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA